

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan Pustaka didasarkan pada penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran tentang konsep dasar dari variabel yang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga penulis membahas mengenai kerangka pemikiran yang berhubungan dengan hubungan variabel bebas dan terikat. Kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan.

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Menurut Sukirno (2016) pengangguran dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang menjadi bagian dalam angkatan kerja sedang membutuhkan dan mencari suatu pekerjaan namun belum mendapatkannya. Menurut Nanga (2001) pengangguran (*unemployment*) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Menurut Kaufman & L.Hotchkiss (1999) pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika

seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.

Badan pusat statistik (BPS) menjelaskan bahwa dalam indikator ketenagakerjaan yang disebut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, dapat dihitung dengan rumus berikut:

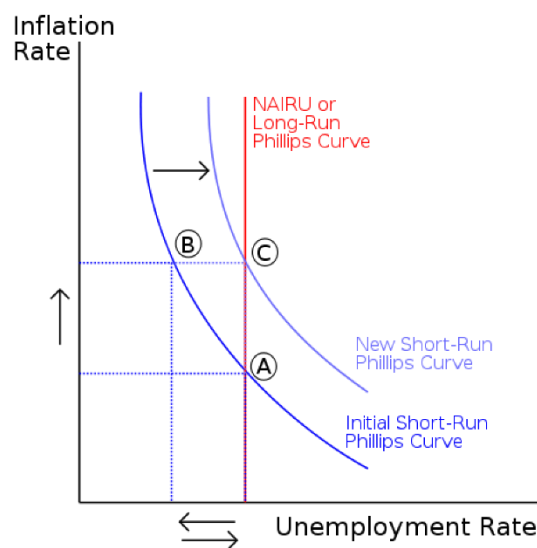
$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persentase.

Natural Rate of Unemployment atau yang sering disebut *NAIRU* (*Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment*) merupakan konsep fundamental dalam ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pengangguran alamiah dalam suatu perekonomian. Tingkat pengangguran alamiah digunakan oleh para ekonom dan pembuat kebijakan dalam membantu menilai kondisi pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Namun, tingkat pengangguran alamiah tidak dapat diamati secara langsung dan harus diperkirakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Barnichon & Matthes (2017) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran alamiah sangat stabil sepanjang sejarah, berkisar antara 4.5% sampai 5.5%.

Berikut grafik yang menampilkan hubungan tingkat pengangguran alami dengan inflasi. NAIRU direpresentasikan oleh garis vertikal merah yang memotong kurva Phillips, menunjukkan titik keseimbangan jangka panjang di mana tingkat inflasi stabil. Milton Friedman (1968) dalam Stamatiou & Dritsaki (2018)

berpendapat bahwa hanya ada *trade-off* jangka pendek antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, tetapi untuk jangka panjang ia memperkenalkan konsep *NAIRU* (*Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment*). *NAIRU* didefinisikan sebagai tingkat pengangguran ketika tingkat inflasi stabil. Oleh karena itu, kurva Phillips jangka panjang bersifat vertikal dan tidak ada *trade-off* antara pengangguran dan inflasi.



Sumber: Stamatiou & Dritsaki (2018)

Gambar 2. 1 Kurva Phillips jangka pendek dengan kurva Phillips jangka panjang (NAIRU)

Pada Gambar 2.1, kita dapat melihat hubungan kompleks antara inflasi dan pengangguran yang dijelaskan melalui dua kurva Phillips jangka pendek (berwarna biru) dan satu kurva Phillips jangka panjang (garis vertikal merah). Kurva Phillips jangka pendek awal menggambarkan *trade-off* antara inflasi dan pengangguran, di mana penurunan tingkat pengangguran dikaitkan dengan kenaikan inflasi. Ketika perekonomian bergerak ke titik B, yang berada di bawah tingkat *NAIRU*, hal ini

menciptakan tekanan inflasi yang lebih tinggi karena pasar tenaga kerja menjadi terlalu ketat.

Dinamika penyesuaian pada Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana ekspektasi inflasi mempengaruhi hubungan Phillips. Ketika perekonomian berada di titik B dengan pengangguran di bawah NAIRU, ekspektasi inflasi meningkat, menyebabkan pergeseran kurva Phillips jangka pendek ke atas (*New Short-Run Phillips Curve*). Pergeseran ini menggerakkan perekonomian ke titik C dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Proses ini menggambarkan bagaimana upaya untuk mempertahankan pengangguran di bawah tingkat alamiahnya akan menghasilkan inflasi yang terus meningkat.

Signifikansi NAIRU dalam kebijakan ekonomi tidak dapat diabaikan. Ketika pembuat kebijakan berusaha menurunkan pengangguran di bawah NAIRU melalui kebijakan moneter atau fiskal ekspansif, hasilnya hanya akan bersifat sementara. Dalam jangka panjang, perekonomian akan kembali ke tingkat NAIRU (titik A), tetapi dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada *trade-off* permanen antara inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan oleh kurva Phillips vertikal jangka panjang.

Pemahaman tentang NAIRU memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan ekonomi. Pertama, kebijakan yang bertujuan mencapai tingkat pengangguran di bawah NAIRU akan kontraproduktif karena hanya akan menghasilkan inflasi yang lebih tinggi tanpa manfaat jangka panjang dalam pengurangan pengangguran. Kedua, untuk menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan, fokus kebijakan harus diarahkan pada faktor-faktor struktural

yang mempengaruhi NAIRU, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, efisiensi pasar tenaga kerja, dan reformasi kelembagaan.

Konsep NAIRU juga menekankan pentingnya ekspektasi dalam dinamika ekonomi makro. Ketika pelaku ekonomi menyesuaikan ekspektasi inflasi mereka, efektivitas kebijakan yang bertujuan menurunkan pengangguran menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas bank sentral dalam mengendalikan inflasi dan komunikasi yang efektif tentang target kebijakan moneter menjadi sangat penting dalam mengelola ekspektasi inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi makro.

Dalam konteks praktis, pemahaman tentang NAIRU membantu pembuat kebijakan dalam menetapkan target pengangguran yang realistis dan berkelanjutan. Mereka harus mempertimbangkan bahwa setiap upaya untuk mendorong pengangguran jauh di bawah NAIRU akan menghadapi batasan alamiah dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, fokus kebijakan sebaiknya diarahkan pada peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dan produktivitas, yang dapat menurunkan NAIRU secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang tidak diinginkan.

2.1.1.2 Teori Pengangguran

1. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1936) berpendapat bahwa masalah dari pengangguran disebabkan karena rendahnya permintaan agregat. Sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi oleh rendahnya konsumsi. Pendapat dari Keynes bahwa hal ini tidak bisa

diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat maka upah turun dan penurunan upah tersebut mengakibatkan kerugian karena menggambarkan daya beli masyarakat pada suatu barang. Hal tersebut akan mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Selain itu, upah cenderung sulit mengalami penurunan sehingga teori Keynes dianggap tidak tepat.

2. Teori Klasik

Teori klasik menyatakan berlawanan dengan teori Keynes, teori ini dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say (1803) dimana menurut teori ini, pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas serta menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (*supply*).

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan Pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal, dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Marius (2004) menyatakan bahwa bila ditinjau dari sebab - sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (*Transisional*). Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain. Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pemecatan.

4. Pengangguran Musiman (*Seasonal*)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern.

6. Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran.

7. Pengangguran Deflator

Pengangguran deflator ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

2.1.1.4 Penyebab Terjadinya Pengangguran

Menurut Phey et al. (2022) secara umum, terdapat beberapa faktor pendorong mengapa pengangguran semakin meningkat, diantaranya:

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Realisasi investasi belum cukup tinggi.
3. Persaingan pasar global.
4. Kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot.
5. Tidak seimbang antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang disediakan.
6. Terbatasnya lowongan pekerjaan sektor formal.
7. Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu Negara menyebabkan masyarakatnya tidak mampu menempuh tingkat pendidikan yang tinggi.
8. Rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki angkatan kerja.
9. Keterampilan dan *skill* para pencari pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.

2.1.1.5 Dampak Terjadinya Pengangguran

Menurut Hadi (2013) terdapat beberapa dampak yang akan dirasakan oleh suatu negara akibat meningkatnya angka pengangguran, diantaranya:

1. Aktivitas perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan.
2. Kemakmuran masyarakat menurun sehingga pendapatan nasional menurun.
3. Angkatan kerja tidak terserap sepenuhnya atau tidak terserap dalam jumlah yang banyak.
4. investasi produktif akan berkurang sehingga kesempatan kerja mengalami penurunan.

2.1.1.6 Cara Mengatasi Pengangguran

Menurut Marliyani (2024) terdapat beberapa cara guna mengatasi pengangguran, diantaranya:

1. Peningkatan keterampilan dan pendidikan untuk mendorong keterampilan maka pemerintah menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Serta dengan pendidikan yang memadai dapat membuat seseorang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualifikasi.
2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan cara meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan bersertifikasi. Secara langsung dapat melatih calon tenaga kerja menuju disiplin dan teratur sehingga melahirkan SDM yang terampil dan profesional.
3. Mendorong kewirausahaan mengatasi pengangguran dan mendorong kewirausahaan adalah suatu tantangan kompleks yang memerlukan

pendekatan yang terpadu dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi dukungan keuangan dan peraturan ramah bagi wirausaha baru, serta perkuat sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memastikan bahwa para pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga, dan *nomos* adalah peraturan, aturan, hukum. Secara *etimologi* (bahasa), pengertian ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan Secara umum, Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dengan kata lain ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang membahas perihal kehidupan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya, aspek-aspek yang dikaji mencakup sistem produksi, sistem penyaluran atau distribusi dan pemakaiannya atau cara mengkonsumsinya berupa baik itu jasa maupun barang. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mencari keuntungan secara materi, untuk mendapatkan gelar atau penghargaan, untuk bisa memperoleh kekuasaan atau sosial kemanusiaan atau saling membantu antar sesama.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa pada masyarakat meningkat serta terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Menurut

Sukirno dalam Hasan et al. (2018) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran perkembangan kondisi perekonomian suatu wilayah pada tahun tertentu dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan total *output* nasional dalam suatu tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam satuan persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek (Ma'ruf & Wihastuti 2008). Menurut Kalsum (2017) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara khususnya pada bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama melakukan analisis hasil tentang pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pada suatu negara maupun pada suatu daerah. Ekonomi dikatakan tumbuh jika ada peningkatan dari produksi barang dan jasa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dalam periode tertentu.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2015) dalam Ma'ruf & Wihastuti (2008) ada 4 (empat) teori-teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Teori pertumbuhan klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill pada abad ke 18-19, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Schumpeter

Teori ini dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (1934) teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasar yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.

3. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar (1939 dan 1946) dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori harrod-domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth*

dalam jangka panjang. Analisis harrod-domar menggunakan pemisahan-pemisahan berikut: barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proporsional dengan pendapat nasional, rasio modal-produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya dan perekonomian terdiri dari dua sektor.

4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Sebagai suatu perluasan teori Keynes, teori Harrod-Domar melihat persoalan pertumbuhan itu dari segi permintaan. Teori pertumbuhan neo-klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda yaitu dari segi penawaran menurut yang dikembangkan oleh Abramovis dan Robert Solow (1956) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dalam kurun waktu jangka panjang, tanpa mengorbankan sumber daya alam atau kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya serta berfokus pada efisiensi penggunaan SDA dan mengintegrasikan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi untuk mencapai suatu Pembangunan yang berkelanjutan.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan mencirikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam kurun waktu jangka pendek, tetapi mengakibatkan dampak negatif berjangka Panjang. Sehingga dapat mengeksploitasi SDA yang berlebihan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan menghasilkan tekanan besar pada lingkungan juga ketidakseimbangan ekonomi dan sosial.

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan saling berinteraksi serta berbeda-beda antar negara.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Investasi.
2. Inovasi dan teknologi.
3. Tenaga kerja.
4. Kebijakan ekonomi.
5. Infrastruktur.
6. Kondisi ekonomi global.
7. Distribusi pendapatan.
8. Sumber daya alam dan ketidakpastian iklim.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu

pertumbuhan ekonomi (Harry & Sitaniapessy, n.d.). Sementara itu, Mankiw (2018) dalam Kusumaningtyas & Muchtolifah (2023) menyebutnya dengan istilah belanja pemerintah, yang diartikan sebagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa oleh pemerintah lokal, negara bagian, hingga pemerintah federal, termasuk di dalamnya adalah biaya upah pegawai pemerintah.

Menurut Mangkoesoebroto (2008) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2.1.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993).

Adapun beberapa teori-teori pengeluaran pemerintah secara Makro, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keynes (1936)

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ merupakan “sumber legitimasi” akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak

cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan dipekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y diamati dari waktu ke waktu melihat beberapa besar pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah (G) dapat meningkatkan yang tentu saja berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

2. Adolph Wagner (1883)

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP (*Gross National Product*). Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Pengamatan empiris terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.
- b) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.

- c) Urbanisasi yang mengiring pertumbuhan ekonomi.
- d) Perkembangan demokrasi.
- e) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

3. Teori Rostow dan Musgrave (1959-1960)

Teori ini mengembangkan teori yang menghubungkan perkembangan pengeluaran dan tahap-tahap pembangunan ekonomi pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pemerintahan harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap menengah investasi pemerintah mulai menurun sedangkan investasi swasta sudah semakin membesar. Akan tetapi peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik masih sangat diperlukan. Pada tahap lanjut aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk kesetaraan hari tua dan program pelayanan masyarakat (Sirojuzilam, 2011).

4. Teori Peacock dan Wiseman (1961)

Teori ini mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah mendasarkannya pada suatu analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai

pengeluaran dan penerimaannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara semena-mena atau sewenang-wenang. Jika pada saat terjadi gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, Maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek infeksi (*infection effect*). Efek ini menyatakan gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial. Keadaan ini menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih besar pula.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer *payment*

Transfer *payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran

bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer *payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun non fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai

dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih diprioritaskan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Pengeluaran pemerintah menurut sifatnya dibedakan menjadi 5 antara lain:

1. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. Dalam hal keuangan ini pemerintah tidak hanya mendanainya melalui APBN.

2. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

3. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain.

4. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi Negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak yatim dan lain-lain.

5. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

2.1.4 Penanaman Modal Asing

2.1.4.1 Pengertian Penanaman Modal Asing

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanam modal asing yakni perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang melakukan usaha penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan cara jalan yang membangun, membeli total perusahaan. Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1967, bahwa penanaman modal

asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan UU ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, mengandung arti yakni secara langsung pemilik modal menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut Igamo (2015) penanaman modal asing atau disebut dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) terjadi ketika sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modal dalam jangka kurun waktu yang panjang kepada perusahaan di negara lain. Negara asal Perusahaan yang menanam modal disebut dengan *host country* sedangkan tempat investasi yang dituju disebut *home country*.

2.1.4.2 Teori Penanaman Modal Asing

Menurut Zaidun (2008) dalam ilmu hukum investasi terdapat tiga ragam pemikiran dalam menafsirkan kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan atau kebijakan hukum investasi dari kepentingan negara penerima modal atau *home country* yakni :

1. *Neo Classical Economic Theory*

Teori yang dikemukakan oleh Alfred Marshall, Robert Solow, dan David Ricardo pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teori ini menjelaskan bahwa jika investasi masuk maka akan membawa dampak positif dan menerima dengan terbuka terhadap keberadaan masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap bermanfaat untuk *home country*. Hal ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa kepada penerima modal akan mendorong modal domestik dan dapat digunakan sebagai berbagai usaha.

2. *Dependency Theory*

Teori yang dikemukakan oleh Raúl Prebisch dan André Gunder Frank pada tahun 1960-1970-an. Dimana teori ini tidak menerima masuknya investasi asing, dan memandang masuknya investor asing dapat melumpuhkan investasi domestik serta mengambil posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional.

3. *The Middle Path Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Jomo K.S, pada tahun 1970-an. Teori ini berpandangan bahwa masuknya investasi asing selain memiliki banyak manfaat bisa menimbulkan dampak negatif, sehingga negara harus berperan untuk mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan melalui *screening* dalam perizinan dan upaya yang serius dalam penegakan hukum.

2.1.4.3 Manfaat Penanaman Modal Asing

Menurut Arsyad (2010) dalam Ardy & Yudhistira (2023) manfaat penanaman modal asing bagi negara berkembang, yaitu:

1. Sumber tabungan.
2. Proses alih teknologi.
3. Menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mendapatkan keterampilan baru bagi negara berkembang.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut ini merupakan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi sumber berpikir penulis, serta untuk memperluas informasi tentang ruang lingkup penelitian.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan bahan pertimbangan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Staderlin et al., (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi, variabel terikat menggunakan jumlah pengangguran.	Variabel bebas menggunakan upah minimum kab/kota.	Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, secara simultan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.	<i>COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Vol.7 (No.5) 2024.</i>
2.	Yuniarti & Imaningsih, (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	Variabel bebas menggunakan tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan.	<i>Journal of Economics and Business, Vol.6 (No.1) 2022.</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Sidoarjo.				
3.	Ardian et al., (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi. variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	Hanya menggunakan satu variabel bebas.	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajeme n, Vol.1, No.3 September 2022.
4.	Fikri, (2023). Pengaruh Upah Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia.	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi, variabel terikat menggunakan pengangguran.	Variabel bebas menggunakan upah dan inflasi.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangu nan, Vol. 5, nomor 1, Maret 2023.
5.	Puspita & Indira, (2023). Determinan Tingkat Pengangguran Negara Berkembang di ASEAN Tahun 2017-2021.	Variabel bebas menggunakan produk domestik bruto dan penanaman modal asing. variabel terikat menggunakan pengangguran.	Variabel bebas menggunakan inflasi, angkatan kerja, jumlah penduduk.	Secara parsial PDB berpengaruh negatif dan signifikan, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan.	<i>INNOVATI VE: Journal Of Social Science Research.</i> Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023.
6.	Syahputra et al., (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	Variabel bebas menggunakan upah minimum dan tingkat pendidikan.	Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan, sementara pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangu nan Daerah Vol. 8. No. 2, Mei – Agustus 2019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera.			terhadap tingkat pengangguran terbuka.	
7.	Kusumaningtyas & Muchtolifah, (2023). Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten.	Variabel bebas menggunakan pengeluaran pemerintah dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	Variabel bebas menggunakan penanaman modal dalam negeri (PMDN).	Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung, sedangkan pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh, sementara itu, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi.	<i>Management Studies and Entrepreneurship Journal. Vol 4(5) 2023.</i>
8.	Bagas & Prihadi, (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2021.	Variabel bebas menggunakan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. variabel terikat tingkat pengangguran.	Variabel bebas menggunakan angkatan kerja, IPM, upah minimum kabupaten dan PDRB pertanian.	Secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh. sementara, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh.	<i>Jurnal Mirai Management. Volume 8 Issue 2 (2023).</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Mahardika & Nurul Badriyah, (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah dan UMR terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Barat Tahun 2017-2021.	Variabel bebas menggunakan pengeluaran pemerintah. variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	Variabel bebas menggunakan tingkat pendidikan dan upah minimum regional.	Secara simultan, variabel penyerapan tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah dan upah minimum regional memiliki pengaruh.	<i>Journal Of Development Economic And Social Studies. Volume 3 No 1 Tahun 2024.</i>
10.	Kuswiyati & Utomo, (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019.	Variabel bebas menggunakan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi. variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	Variabel bebas menggunakan IPM dan investasi.	Tingkat pengangguran dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan ekonomi & secara negatif oleh variabel investasi, sementara variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh.	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business. Vol.6 (2) September 2022.</i>
11.	Astrid & Soekapdjo, (2020). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, IPM, PMA, dan PMDN terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia.	Variabel bebas menggunakan PMA, variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	Variabel bebas menggunakan inflasi, jumlah penduduk, IPM dan PMDN.	PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.	Forum Ekonomi, 22 (2) 2020, 319-325.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Djamin, (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan.	Variabel bebas menggunakan investasi asing dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	Variabel bebas menggunakan investasi dalam negeri.	Investasi asing tidak signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di sumatera selatan.	Majalah Ilmiah Manajemen. Vol: 09.01.2020 Hal: 137-146.
13.	Larasati, (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Populasi dan Investasi Asing Langsung terhadap Pengangguran di Indonesia.	Variabel bebas menggunakan investasi asing langsung, dan variabel terikat menggunakan pengangguran.	Variabel bebas menggunakan inflasi dan populasi.	Dalam jangka pendek investasi asing langsung berpengaruh positif signifikan.	AMBITEK Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi. Vol. 3 Agustus 2023.
14.	Al-faridzi Salman et al., (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Investasi Asing, dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara.	Variabel bebas menggunakan investasi asing dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	Variabel bebas menggunakan jumlah penduduk, pendidikan dan inflasi.	Secara parsial investasi asing tidak berpengaruh signifikan, dan variabel jumlah penduduk, pendidikan, investasi asing dan inflasi berpengaruh secara simultan.	<i>Managemnt Studies and Entrepreneurship Journal</i> . 4(6) 2023.
15.	Putri & Ash Shidiqie, (2023). Analisis Faktor yang	Variabel bebas menggunakan penanaman modal asing, dan variabel	Variabel bebas menggunakan penanaman modal dalam	Penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2015-2020.	terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	negeri dan teknologi.	terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Volume 1 Issue 2, 2022: 220-225.
16.	Alalawneh & Nessa (2020). <i>The Impact of Foreign Direct Investment on Unemployment : Panel Data Approach.</i>	Variabel bebas menggunakan FDI dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	Menggunakan data panel dan lokasi penelitiannya di Mesir, Yordania, Lebanon, Maroko, Tunisia dan Turki.	FDI berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka panjang, tetapi dampaknya tidak langsung terlihat dalam jangka pendek.	<i>Emerging Science Journal Vol. 4, No. 4, August, 2020.</i>
17.	Mahda et al., (2023). <i>Unemployment , Economic Growth, and Government Expenditure in West Java: Perspectives from Dynamic Panel Model.</i>	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran terbuka.	Menggunakan variabel bebas IPM dan angkatan kerja.	Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang secara langsung mendukung teori <i>okun's law</i> . pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran dalam jangka panjang.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 21, No. 02, December 2023, 161-178.
18.	Tran Pham, (2024).	Variabel bebas menggunakan	Menggunakan kualitas	Peningkatan pengeluaran	<i>(IJDI) Internation</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Impact of Government Expenditure on Unemployment in Asian Countries: Does Institutional Quality Matter?</i>	pengeluaran pemerintah dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	institusi sebagai variabel moderasi. lokasi penelitian di negara-negara Asia.	pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran, selain itu FDI berperan dalam mengurangi pengangguran.	<i>al Journal of Development Issues. 1446-8956 DOI 10.1108/IJDI-05-2024-0127.</i>
19.	Sri et al., (2024). <i>The Effect of Economic Growth and Foreign Direct Investment on Unemployment</i>	Variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi, FDI, dan variabel terikat menggunakan tingkat pengangguran.	Menggunakan model <i>Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)</i> , lokasi penelitian di Gambia.	Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, sementara FDI memiliki dampak positif dan signifikan.	<i>International Journal of Social Science and Business Volume 8, Number 1, 2024, pp. 133-141.</i>
20.	Kalinová & Kroutlová, (2023). <i>The Relationship Between Unemployment and Macroeconomic Indicators.</i>	Variabel bebas menggunakan dan variabel terikat menggunakan pengangguran.	Variabel bebas menggunakan (<i>gross values added</i>), dan lokasi penelitiannya di Moravia-Silesia.	Menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara pengangguran dengan indikator ekonomi seperti PDB di wilayah Moravia-Silesia. peningkatan PDB berkontribusi pada penurunan pengangguran, sejalan dengan hukum okun.	<i>SHS Web of Conferences 160, 01008 (2023).</i>
21.	Saraireh, (2020).	Variabel bebas menggunakan	Menggunakan uji	Dalam jangka panjang	<i>Asian Journal of</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>The Impact of Government Expenditures on Unemployment : A Case Study of Jordan.</i>	Pengeluaran Pemerintah dan variabel terikat menggunakan Tingkat Pengangguran.	kointegrasi <i>ARDL (Autoregressive Distributed Lag)</i> dan lokasi penelitiannya di Yordania.	peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% dari PDB dapat mengurangi tingkat pengangguran sekitar 0,43% pada tahun yang sama. dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah justru memiliki dampak positif dan signifikan.	<i>Economic Modelling Vol. 8, No. 3, 189-203.</i>	

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka, untuk memudahkan penulis maka dimunculkan kerangka pemikiran dalam menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui hukum Okun yang menyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara keduanya. Menurut Hukum Okun (1962) dalam Putong (2013) jika pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) melampaui tren yang telah dicapai pada suatu tahun tertentu sebesar 2,5 persen, maka tingkat pengangguran akan turun

sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran akan semakin menurun karena pertumbuhan ekonomi cenderung didorong oleh sektor produksi yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan bagi industri untuk meningkatkan produksi, yang berkontribusi pada peningkatan penggunaan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra & Nurhayani (2019) pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi di Sumatera, sejalan dengan penelitian Yuniarti & Imaningsih (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Sidoarjo, juga diperkuat oleh penelitian Puspita & Indira (2023) yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran negara berkembang di ASEAN.

2.2.2 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Belanja pemerintah dapat menjadi salah satu sarana dalam menanggulangi pengangguran, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya (Putong, 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Keynes yang menyatakan bahwa diperlukan intervensi pemerintah dalam sistem perekonomian, dimana suntikan dana berupa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*) dinilai dapat

meningkatkan *output* nasional sehingga pada akhirnya mengurangi pengangguran (Falianty, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif atau berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas & Muchtolifah (2023) dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, sejalan dengan penelitian Mahardika & Nurul (2024) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran di Jawa Barat, di perkuat oleh Kalinová & Kroutlová (2023) yang menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara pengangguran dengan indikator ekonomi seperti PDB di wilayah Moravia-Silesia.

2.2.3 Hubungan Antara Penanaman Modal Asing Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

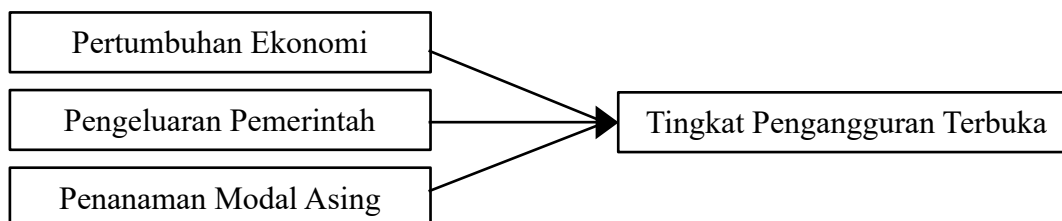
Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, hubungan antara investasi dan pengangguran dapat dijelaskan. Model ini merupakan pengembangan dari teori Keynes yang menekankan peran tabungan dan investasi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tabungan yang dilakukan dan semakin besar investasi yang terjadi, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Investasi asing yang datang dari negara lain juga memberikan peluang bagi negara berkembang untuk mendukung pembangunan mereka. Hal ini sangat penting mengingat terbatasnya sumber dana yang tersedia di negara berkembang

sementara kebutuhan keuangan mereka sangat besar. Oleh karena itu, investasi asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Investasi memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Melalui investasi, masyarakat dapat terus meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Investasi asing juga memberikan dampak positif, seperti pembangunan infrastruktur negara, pendirian dan pengembangan industri, serta pemanfaatan sumber daya baru. Hal ini cenderung berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Shidiqie (2023) dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, sejalan dengan penelitian Astrid & Soekapdjo (2020) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, diperkuat oleh penelitian Larasati (2023) yang menyimpulkan bahwa investasi asing langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap pengangguran di Indonesia.

Berikut kerangka pemikiran penulis yang berguna untuk memperjelas arah pemikiran penulis dalam menganalisis data:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan keterkaitan antar variabel di atas, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka, maka dapat dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel pada suatu penelitian.

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing, secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2004-2023.
2. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing, secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2004-2023.